

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM URBAN FARMING UNTUK MEWUJUDKAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP KOTA SURABAYA

Yola Erlanda<sup>1</sup>, Anggraeny Puspaningtyas<sup>2</sup>, Eddy Wahyudi<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

e-mail: [yolaerlanda@gmail.com](mailto:yolaerlanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [anggraenypuspa@untag-sby.ac.id](mailto:anggraenypuspa@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>, [ediwahyudi@untag-sby.ac.id](mailto:ediwahyudi@untag-sby.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini membahas pengembangan program urban farming di Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana urban farming berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan mandiri dan berkelanjutan di tengah tantangan urbanisasi dan penyusutan lahan pertanian. Dengan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat oleh Dubois dan Miley, penelitian ini mengidentifikasi empat indikator utama: membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi, terlibat dalam pemecahan masalah, dan merefleksikan sikap serta nilai profesi pekerjaan sosial. Hasil menunjukkan bahwa program urban farming tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga. Masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang pada gilirannya memperkuat kemandirian dan kapasitas lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dan komunitas dalam mengembangkan program urban farming yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pertanian Perkotaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pangan.

*Abstract* – This study discusses the development of an urban farming program in Sambikerep District, Surabaya City, as an effort to realize a sustainable food security policy. Using a descriptive qualitative approach, this study explores how urban farming contributes to creating an independent and sustainable food system amidst the challenges of urbanization and shrinking agricultural land. Referring to the theory of community empowerment by Dubois and Miley, this study identifies four main indicators: building helping relationships, building communication, engaging in problem solving, and reflecting the attitudes and values of the social work profession. The results show that the urban farming program not only improves food security but also empowers communities through collaboration between the government and residents. Communities play an active role in the decision-making and problem-solving process, which in turn strengthens local independence and capacity. This study is expected to be a practical reference for local governments and communities in developing more effective and sustainable urban farming programs.

**Keywords:** Urban Farming, Community Empowerment, Food Security.

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan menjelaskan peraturan yang mengatur tentang sistem pangan nasional di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan memberikan landasan hukum bagi kebijakan dan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategi ketahanan pangan dan gizi menjelaskan bahwa peningkatan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertanian Pangan menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Presiden. Sementara ranah nasional tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa sektor pertanian diharapkan terdapat adanya

peningkatan ketahanan pangan dan daya saingnya agar mendukung pertanian Indonesia menjadi lebih maju, mandiri, dan modern (Kementerian Pertanian, 2021). Peningkatan ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketika negara maupun individu masyarakat memiliki cukup makanan yang aman, bermutu, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga semua orang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Badan Pangan Nasional, 2022).

Kota-kota besar di Indonesia, termasuk salah satunya Kota Surabaya memiliki indeks ketahanan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bengkulu, dari segala indikator-indikator ketahanan pangan seperti pengeluaran rumah tangga, indeks keterjangkauan, indeks pemanfaatan, garis kemiskinan maupun persentase penduduk miskin menunjukkan kondisi yang lebih baik di Kota Surabaya dibandingkan Kota Bengkulu (Ubi et al., 2024). Berdasarkan IKP (Indeks Ketahanan Pangan) Kota Surabaya memiliki presentase skor 92,1 dibandingkan dengan Kota Bengkulu dengan presentase skor 75,68 dengan perbedaan yang skor sangat jauh (Badan Pangan Nasional, 2022).

Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, terutama akibat urbanisasi yang pesat dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya tercatat mencapai 3,02 juta jiwa bertambah pada tahun 2024 dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021, Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 0,82% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 0,36% (databoks.com). Dengan angka tersebut, menjadikan kota Surabaya sebagai penyumbang terbesar kepadatan penduduk Jawa Timur yang merupakan provinsi terpadat kedua di Indonesia.

Urbanisasi sering kali menyebabkan penyusutan lahan pertanian dan peningkatan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota. Dalam menghadapi tantangan tersebut, urban farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu solusi inovatif untuk meningkatkan ketahanan pangan secara lokal. Dengan prestasi tersebut untuk menjaga ketahanan pangan agar terus stabil, Pemerintah Kota Surabaya telah mencanangkan program urban farming sejak tahun 2009 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya (Pradana & Nurharjadmo, 2021). Dukungan pemerintah kota Surabaya terus berlanjut hingga saat ini melalui program yang baru saja diresmikan yaitu program Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan, ini merupakan salah satu program dari arahan Presiden Prabowo Subianto dimana seluruh Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia secara serentak melakukan penanaman dengan mengoptimalkan lahan di wilayahnya masing – masing (rri.co.id). Selain itu, dalam upaya mendukung program tersebut pemerintah kota Surabaya telah menyediakan lahan seluas 1.200 meter<sup>2</sup>, benih, dan pupuk dan melibatkan Kelompok Tani (Poktan) di setiap kelurahan, hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (petisi.co).

Sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan pangan, Program pertanian perkotaan telah sukses memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber pangan lokal (Wijaya et al., 2024). Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang memiliki kendali atas sumber daya, pengetahuan, dan hasil produksi pangan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu maupun kelompok dalam mengidentifikasi masyarakat dilibatkan dalam identifikasi potensi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, yang meningkatkan kemandirian dan kapasitas Mereka (Istikhomah & Riyadi, 2021). Pemberdayaan Masyarakat diatur pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, RT, dan RW dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting sebagai fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, sehingga penting untuk mengeksplorasi potensi lokal yang terdapat di desa (Endah, 2020).

Namun terdapat permasalahan dalam melaksanakan program tersebut seperti ketergantungan pada lahan tidak permanen yang artinya lahan bukan milik sendiri yang dimiliki pihak ketiga, ataupun lahan milik pemerintah menyebabkan ketidakpastian karena lahan tersebut dapat dialihfungsikan kapan saja untuk pembangunan perumahan atau komersial, sehingga keberlanjutan program urban farming menjadi dan juga banyak masyarakat masih menggunakan metode pertanian tradisional tanpa adanya penerapan teknologi baru yang menyebabkan produktivitas menjadi rendah dan pemanfaatan lahan terbatas di daerah perkotaan menjadi kurang efisien (Dewi & Santoso, 2016). Masyarakat masih kekurangan pelatihan yang cukup tentang teknik pertanian perkotaan modern seperti hidroponik dan vertikultur, yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian (Dian Ajeng Safitri & Resa Rasyidah, 2022).

Dengan berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Peraturan Walikota, 2021). Praktik penanaman tanaman di perkotaan ini dianggap sebagai program pengembangan masyarakat di bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik sehingga masyarakat dapat ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau (Amelia & Nawangsari, 2021). Dalam praktik penanaman tanaman di perkotaan ini upaya warga sukses, dikarenakan sukses memanfaatkan area rawa jadi lahan produktif dan bernilai ekonomi (detik.com). dikatakan sukses sebab kepadatan bangunan kota Surabaya yang semakin banyaknya masyarakat pedesaan yang pindah ke wilayah kota, maka semakin sempit pula lahan tanah permukiman di perkotaan (Firsa Asha Sabitha, 2022).

Urban farming tidak hanya memanfaatkan lahan sempit di perkotaan seperti pekarangan rumah, atap gedung, dan area kosong lainnya, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam produksi pangan. Hal ini relevan di Surabaya, di mana beberapa wilayah seperti Kecamatan Sambikerep masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam pelaksanaan urban farming dikarenakan wilayah ini masih melakukan kegiatan pertanian hingga saat ini. Wilayah ini tingkat urbanisasi yang termasuk tinggi dikarenakan faktor banyaknya warga pindah datang dengan alasan Pendidikan, pekerjaan maupun keluarga, Total luas lahan garapan mereka sebesar 211,85 Ha dengan produksi tanaman mencapai 6000 Arah Peningkatan Pengelolaan Program Urban Farming di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya (Dewi & Santoso, 2016). Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian tentang Pengembangan Program Urban Farming untuk Mewujudkan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya untuk mengeksplorasi potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam hal pemanfaatan lahan tidur dan pemberdayaan masyarakat perkotaan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi ketahanan pangan yang lebih relevan dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat peran pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis dan akademis bagi pemerintah daerah, komunitas lokal, serta institusi sosial lainnya dalam mengembangkan program urban farming.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln dalam buku mereka "The SAGE Handbook of Qualitative Research," bahwa penelitian kualitatif adalah

upaya untuk memahami fenomena sosial dari perspektif individu yang mengalaminya. Mereka menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman. Fokus utama menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009), Penelitian ini dilakukan di lokasi Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Teknik analisa data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam peneitian ini mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Urban Farming Untuk Mewujudkan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Pembahasan mencakup pemberdayaan masyarakat, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana urban farming berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Kecamatan Sambikerep. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah di lakukan peneliti di analisis menggunakan dalam teori pemberdayaan masyarakat oleh Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009) merancang sejumlah indikator pemberdayaan, seperti :

### **1. Membangun relasi pertolongan**

Dalam pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep, membangun relasi pertolongan menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Relasi pertolongan di sini tidak sekadar mencerminkan bantuan satu arah dari pemerintah ke masyarakat, namun lebih kepada keterhubungan antar pihak pemerintah, masyarakat umum, kelompok tani, penyuluh pertanian.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa upaya membangun relasi pertolongan melalui urban farming telah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Kala itu, intervensi dilakukan secara spesifik kepada kelompok keluarga miskin (Gakin) melalui pendekatan pemberdayaan berbasis budidaya pertanian hortikultura (seperti kangkung, sawi, tomat, cabai) dan perikanan (lele dan sidat). Tujuan utamanya adalah menciptakan ketahanan pangan keluarga, terutama melalui optimalisasi lahan pekarangan agar kebutuhan dasar rumah tangga dapat terpenuhi secara mandiri.

Seiring perkembangan, pendekatan program meluas bukan hanya menysasar kelompok Gakin, tetapi juga masyarakat luas dan petani perkotaan yang terdampak. Bantuan yang diberikan pemerintah terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu bantuan fisik dan non-fisik. Bantuan non-fisik berupa penyuluhan, pelatihan, dan akses terhadap platform edukatif seperti “Golden Melon”, sedangkan bantuan fisik meliputi pupuk, obat-obatan, sarana produksi (sarpas) seperti jaring burung, serta alsintan seperti handtraktor dan cultivator. Namun, akses terhadap bantuan fisik tersebut umumnya diperuntukkan bagi kelompok tani yang telah terdaftar resmi (dibuktikan dengan SKT dari DPMPTSP).

Menjadi bagian dari kelompok tani membawa berbagai keuntungan strategis. Bahwa kelompok binaan secara rutin mendapatkan pelatihan dan starter kit, seperti pelatihan hidroponik dan budidaya sayuran dalam pot. Di luar pelatihan, terdapat juga program intervensi menjelang hari raya keagamaan, dengan pemberian benih cabai dan bawang merah, sebagai bentuk dukungan pengendalian inflasi komoditas pangan strategis. Relasi pertolongan antara masyarakat dan pemerintah juga diwujudkan melalui dukungan berkelanjutan sebagaimana dirasakan oleh pelaku urban farming lokal. Bantuan berupa pelatihan, modal, hingga fasilitasi akses pasar tani secara rutin disediakan oleh pemerintah kota.

Dapat disimpulkan bahwa relasi pertolongan bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi tentang membangun struktur pendukung dan ekosistem sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan. Program urban farming di

Sambikerep telah menjadi medium strategis bagi tumbuhnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang bersifat partisipatif dan inklusif. Keberadaan kelompok tani sebagai wadah kolektif semakin memperkuat ketahanan sosial, karena melalui kelompok inilah transfer ilmu, sumber daya, dan peluang ekonomi bisa tersebar secara lebih adil dan efisien. Oleh karena itu, strategi membangun relasi pertolongan perlu terus diperkuat, baik dari segi regulasi, kapasitas SDM, maupun jaringan kerja sama antarpihak, agar program urban farming dapat terus berkembang dan memberi dampak signifikan terhadap ketahanan pangan wilayah, khususnya di Kecamatan Sambikerep.

Dari sudut pandang yang telah disebutkan, hal ini dihubungkan dengan teori menurut Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009) membangun relasi pertolongan dalam konteks pekerjaan sosial adalah proses interaktif antara pemberi pertolongan (helper) dan penerima pertolongan (client), yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Relasi ini tidak bersifat dominatif, melainkan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis pada kekuatan (strength-based), di mana penerima pertolongan juga memiliki potensi dan peran aktif dalam proses perubahan sosial. Konsep ini selaras dengan realitas pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menjalankan berbagai bentuk intervensi sosial yang tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan mengarah pada pemberdayaan.

## **2. Membangun komunikasi**

Dalam pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep, komunikasi terbukti menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan program. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran, partisipasi, dan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Proses membangun komunikasi ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus bersifat partisipatif dan terbuka, mencakup berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa komunikasi yang efektif mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ketika ada kebijakan atau program baru dari pemerintah terkait urban farming, komunikasi menjadi sarana untuk menyosialisasikan tujuan program, menjelaskan manfaat, serta menyampaikan bentuk dukungan yang akan diberikan. Sebaliknya, masyarakat juga memanfaatkan jalur komunikasi ini untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kendala teknis, serta potensi lokal yang bisa dikembangkan. Selain komunikasi yang bersifat formal melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), terdapat pula komunikasi informal yang berlangsung secara langsung antara penyuluh dan masyarakat, maupun antaranggota kelompok tani. Komunikasi informal ini seringkali lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi di lapangan, seperti dalam menyampaikan informasi tentang pelatihan, bantuan alat dan bahan, ataupun masalah yang muncul seperti serangan hama atau kekurangan pupuk. Masyarakat juga mengakui bahwa keterbukaan informasi menjadikan mereka lebih terlibat dalam kegiatan urban farming, meskipun tidak secara langsung tergabung dalam kelompok tani. Misalnya, melalui informasi yang disebarkan secara lisan atau melalui pertemuan warga, mereka dapat mengikuti pelatihan, membeli hasil panen dengan harga terjangkau, serta mengetahui manfaat program bagi lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi membangun jembatan antara pelaku utama dan masyarakat luas, serta menciptakan inklusivitas dalam pelaksanaan program. Dalam konteks pemberdayaan, komunikasi berfungsi untuk membangun kepercayaan, menciptakan dialog yang sejajar, serta memperkuat jejaring sosial antarwarga.

Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga mendengarkan dan merespons masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan komunikasi yang efektif dalam program urban farming tidak hanya meningkatkan koordinasi dan efisiensi program, tetapi juga mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis komunitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, membangun komunikasi dalam program urban farming adalah sebuah proses strategis yang melibatkan pertukaran informasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta penciptaan ruang partisipatif yang inklusif. Komunikasi yang baik memperkuat keberhasilan program, menjembatani berbagai kepentingan, serta menjaga kesinambungan kegiatan pertanian perkotaan di tengah dinamika masyarakat perkotaan.

Dari sudut pandang yang telah disebutkan, hal ini dihubungkan dengan teori menurut Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009) bahwa komunikasi merupakan inti dari proses pemberdayaan, di mana komunikasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga bersifat transformasional. Komunikasi menurut mereka adalah bagian dari relasi pertolongan, yaitu interaksi timbal balik yang membangun hubungan antara pemberi dan penerima bantuan, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesetaraan, partisipasi aktif, dan kemandirian. Konsep ini sangat relevan dengan pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep. Dalam praktiknya, komunikasi tidak hanya digunakan sebagai sarana menyampaikan kebijakan atau instruksi teknis dari pemerintah kepada masyarakat, melainkan juga sebagai alat membangun dialog dua arah. Sebagaimana diungkapkan oleh para informan lapangan, komunikasi efektif terbukti mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok tani dan masyarakat umum.

### **3. Terlibat dalam pemecahan masalah**

Dalam pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep, keterlibatan masyarakat dalam proses pemecahan masalah menjadi elemen penting yang memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program. Keterlibatan ini tidak hanya sebatas menjalankan instruksi dari pemerintah atau penyuluh pertanian, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis penyebabnya, serta merumuskan solusi bersama. Setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan peneliti mengemukakan bahwa kelompok tani dan masyarakat binaan tidak bersikap pasif ketika menghadapi kendala seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau keterbatasan alat produksi. Sebaliknya, mereka terbiasa melakukan diskusi internal untuk mencari alternatif solusi secara mandiri. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal, barulah mereka menghubungi penyuluh pertanian untuk mendapatkan pendampingan teknis. Proses ini menunjukkan adanya transfer pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan pertanian secara mandiri.

Penyuluh pertanian pun tidak berperan sebagai instruktur satu arah, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Penyuluh menginisiasi diskusi terbuka, mengajak masyarakat untuk menganalisis masalah bersama, dan mendorong mereka untuk aktif menyusun strategi penyelesaian. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat, di mana proses penyelesaian masalah menjadi media pembelajaran kolektif sekaligus penguatan kapasitas lokal. Partisipasi aktif dalam pemecahan masalah juga menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan kontribusinya dihargai, mereka akan lebih terdorong untuk menjaga keberlangsungan kegiatan. Dalam konteks ini, proses pemecahan masalah bukan hanya bertujuan menyelesaikan persoalan teknis semata, tetapi juga membentuk pola pikir mandiri dan bertanggung jawab yang sangat dibutuhkan

dalam program ketahanan pangan berbasis komunitas.

Dari sudut pandang yang telah disebutkan, hal ini dihubungkan dengan teori menurut Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009) sangat relevan dengan praktik yang terjadi dalam pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep. Dalam kerangka teori tersebut, pemecahan masalah bukanlah proses yang bersifat top-down, melainkan merupakan interaksi kolaboratif antara pihak yang memberikan pertolongan (seperti pemerintah atau penyuluh) dan pihak yang menerima (masyarakat atau kelompok sasaran). Tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian dan pemberdayaan, bukan ketergantungan. Dubois dan Miley menekankan bahwa proses pertolongan harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah, analisis penyebab, perumusan solusi, dan pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan temuan di lapangan, di mana masyarakat atau kelompok tani di Kecamatan Sambikerep tidak langsung menggantungkan diri pada pemerintah ketika menghadapi masalah, tetapi berinisiatif untuk berdiskusi, mencari solusi mandiri, dan hanya meminta bantuan ketika benar-benar diperlukan. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menjadi subjek aktif dalam pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan.

#### **4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial**

Pelaksanaan program urban farming di Kecamatan Sambikerep tidak hanya mencerminkan aspek teknis dalam pengembangan pertanian perkotaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai dan sikap profesi pekerjaan sosial tercermin melalui praktik para pelaksana lapangan, penyuluh, serta pemangku kebijakan. Hal ini terlihat dari pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima program. Salah satu nilai fundamental dalam pekerjaan sosial adalah komitmen terhadap keadilan sosial, penghargaan terhadap martabat manusia, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, para pelaksana program menunjukkan sikap yang menghargai martabat kelompok tani dan warga dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Evaluasi tidak dilakukan secara sepihak, tetapi justru menjadi ruang refleksi bersama antara pihak penyuluh dan masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap suara masyarakat sebagai sumber pengetahuan yang sah dan berharga. Sikap empatik dan menghormati keragaman kondisi masyarakat juga tampak dari mekanisme evaluasi yang fleksibel. Dalam praktiknya, penyuluh pertanian tidak hanya berfokus pada capaian angka semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan personal yang memengaruhi keberhasilan program, seperti kematian anggota kelompok, keterbatasan air, atau kelangkaan pupuk. Dengan demikian, pelaksana program menunjukkan nilai kemanusiaan dan sensitivitas sosial, yang menjadi inti dari profesi pekerjaan sosial.

Selain itu, proses evaluasi yang dilakukan secara partisipatif menggambarkan sikap kolaboratif dan non-dominatif, di mana masyarakat tidak hanya mendengarkan hasil evaluasi, tetapi juga ikut menganalisis penyebab kegagalan dan merumuskan langkah perbaikan. Ini mencerminkan nilai pemberdayaan (empowerment), yakni memberikan ruang bagi individu dan kelompok untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Penting pula dicatat bahwa penyuluh pertanian berusaha membangun kemandirian masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah. Ini sejalan dengan etika pekerjaan sosial yang menekankan pada pengembangan potensi dan kapasitas individu dan komunitas, agar mereka mampu mengatasi tantangan sosial secara mandiri. Secara keseluruhan, praktik evaluasi dalam program urban farming di Kecamatan Sambikerep tidak hanya menggambarkan kinerja teknis, tetapi juga merupakan cerminan nyata dari sikap dan nilai-nilai profesi pekerjaan sosial, seperti penghargaan terhadap partisipasi, keadilan,

empati, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa program pembangunan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga bermakna secara sosial dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Dari sudut pandang yang telah disebutkan, hal ini dihubungkan dengan teori menurut Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009) untuk memberdayakan individu dan komunitas melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kolaborasi. Dalam konteks program urban farming ini, nilai pemberdayaan terlihat jelas dalam upaya para penyuluh dan kelompok tani untuk saling berbagi informasi, mencari solusi bersama, dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan pangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penyajian data pemberdayaan masyarakat melalui program urban farming untuk mewujudkan kebijakan ketahanan pangan Di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dengan menggunakan teori Dubois dan Miley dalam Nawawi (2009) terdapat empat indikator yang penulis gunakan yaitu:

- a. Membangun relasi pertolongan, membangun relasi pertolongan menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Relasi pertolongan di sini tidak sekadar mencerminkan bantuan satu arah dari pemerintah ke masyarakat, namun lebih kepada keterhubungan antar pihak pemerintah, masyarakat umum, kelompok tani, penyuluh pertanian.
- b. Membangun komunikasi, efektif mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ketika ada kebijakan atau program baru dari pemerintah terkait urban farming, komunikasi menjadi sarana untuk menyosialisasikan tujuan program, menjelaskan manfaat, serta menyampaikan bentuk dukungan yang akan diberikan. Sebaliknya, masyarakat juga memanfaatkan jalur komunikasi ini untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kendala teknis, serta potensi lokal yang bisa dikembangkan.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah, proses penyelesaian masalah menjadi media pembelajaran kolektif sekaligus penguatan kapasitas lokal. Partisipasi aktif dalam pemecahan masalah juga menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan kontribusinya dihargai, mereka akan lebih terdorong untuk menjaga keberlangsungan kegiatan. Dalam konteks ini, proses pemecahan masalah bukan hanya bertujuan menyelesaikan persoalan teknis semata, tetapi juga membentuk pola pikir mandiri dan bertanggung jawab yang sangat dibutuhkan dalam program ketahanan pangan berbasis komunitas
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial, Dalam praktiknya, penyuluh pertanian tidak hanya berfokus pada capaian angka semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan personal yang memengaruhi keberhasilan program, seperti kematian anggota kelompok, keterbatasan air, atau kelangkaan pupuk. Dengan demikian, pelaksana program menunjukkan nilai kemanusiaan dan sensitivitas sosial, yang menjadi inti dari profesi pekerjaan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Program “Urban Farming” Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya). *Jurnal Governansi*, 7(2), 121–130. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4095>
- Ariyanto, R., Puspitasari, D., & Ericawati, F. (2017). Penerapan Metode Double Exponential

- Smoothing Pada Peramalan Produksi Tanaman Pangan. *Jurnal Informatika Polinema*, 4(1), 57–62. <https://doi.org/10.33795/jip.v4i1.145>
- Ashari, N., Saptana, N., & Purwantini, T. B. (2016). Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(1), 13. <https://doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.13-30>
- Aussie, A., & Asri, A. (2018). Fasilitas Eduwisata Urban Farming di Surabaya. *JURNAL EDimensi ARSITEKTUR*, 6(1), 241–248.
- Badan Pangan Nasional. (2022). Indeks Ketahanan Pangan 2022. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257.
- Dewi, R. R., & Santoso, E. B. (2016). Arahan Peningkatan Pengelolaan Program Urban Farming di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 203–208. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18167>
- Dian Ajeng Safitri & Resa Rasyidah. (2022). Optimalisasi Urban Farming untuk Membangun Kemandirian Pangan Rumah Tangga di Kelurahan Bringin, Sambikerep, Surabaya. *Jurnal Abdimas Bela Negara*, 3(2), 22–34.
- District, S., & Figures, I. N. (2024). KECAMATAN SAMBIKEREK.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Firsa Asha Sabitha. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.268>
- Istikomah, F., & Riyadi, A. (2021). Dinamika Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Mandiri Energi Di Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 11–33.
- Kementerian Pertanian. (2021). Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021. *Kementerian Pertanian*, 0–161. <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2023/10/RENSTRA-KEMANTAN-2020-2024-REVISI-2-26-Agt-2021.pdf>
- Peraturan Walikota. (2021). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali\\_2029.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf)
- Pradana, A. R., & Nurharjadmo, W. (2021). Analisis Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya. *Wacana Publik*, 1(2), 312. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54598>
- Ubi, C., Kuning, J., & Kabupaten, D. I. (2024). *Jurnal Agribisnis Unisi* Vol. 13 No. 1 Tahun 2024. 13(1), 1–8.
- Wijaya, A., Masyarakat, I. K., Kedokteran, F., & Jambi, U. (2024). STIKes Mitra Keluarga *Jurnal Mitra Masyarakat ( JMM )* PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMBERDAYAAN DI DESA JUJUN dan merugikan terhadap stunting , sedangkan penelitian mengenai pemberdayaan sosial PKK mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bag. 05(02), 69–75.